



Ma'ruf Abdullah lahir di Barabai (Kab HST) 30 Agustus 1949. Menyelesaikan pendidikan SD (SRN) di Binuang 1961, SMPN di Rantau 1964, SMEAN di Banjarmasin 1967, KPPM di Yogyakarta 1969, S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 1983, S2 Manajemen Pascasarjana STIE IPWIJA Jakarta 1999, S2 Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas DR Soetomo Surabaya 2003, dan S3 Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2007.

... paham neoliberal tidak peduli dengan kedaulatan suatu bangsa. Bagi mereka kompetisi penuh melalui jargon pasar bebas merupakan satu-satunya cara untuk bertahan. Siapa yang bisa bertahan dialah yang unggul (survival of the fittest).

Betapa malunya kita sebagai bangsa yang merdeka, karena kedaulatan kita di bidang ekonomi dan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", disingkirkan begitu saja oleh lembaga-lembaga keuangan internasional (World Bank dan IMF), gara-gara kita meminjam dana (loan) untuk membiayai pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Sebelum loan itu disetujui IMF menetapkan prasyarat agar negara peminjam lebih dahulu melakukan penyesuaian strukturisasi (adjustment programme) dengan melakukan tiga hal: deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. Melalui tiga hal inilah akhirnya negara-negara berkembang yang memerlukan pinjaman (loan) terjebak dalam prangkap neoliberal, karena harus merubah semua aturan yang tidak sesuai dengan aturan neoliberal, menjual saham aset milik negara seperti BUMN kepada korporasi multi nasional, dan mengikuti liberalisasi dalam perdagangan yang mereka atur melalui WTO (World Trade Organization).

Dengan demikian maka hilanglah kedaulatan negara peminjam untuk:

- (i) mengatur sendiri pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya.
- (ii) mengatur sendiri aset yang dimiliki negara seperti misalnya BUMN.
- (iii) Mengatur sendiri kebijaksanaan perdagangan luar negeri.

Dampak dari semua itu maka aktivitas pengelolaan sumber daya alam kita dikendalikan oleh mereka (kontraktor multi nasional), begitu juga aset milik negara seperti BUMN dimana sebagian sahamnya dimiliki mereka, dan kita banyak kehilangan pendapatan dari perdagangan luar negeri, terutama dengan adanya penurunan bea masuk barang impor. Dan utang luar negeri itu semakin banyak, baik pokok pinjamannya maupun bunganya, yang pembayarannya harus ditanggung oleh anak cucu kita sampai beberapa generasi. Sampai kapan neoliberal

ISBN 602-14830-4-9



Penerbit:

CV. ASWAJA PRESSINDO

Anggota IKAPI No 071 / DIY / 2011

Jl. Plosokuning V No. 73, Minomartani

Telp (0274) 4462377

Email: aswaajapressindo@gmail.com



S

No